

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN WAJIB LATIH DAN GLADI LAPANG
BAGI MASYARAKAT KAWASAN RAWAN BENCANA MERAPI**

Puri Bhakti Renatama ¹⁾, Yoyon Suryono ²⁾
BKKBN Provinsi Kalimantan Barat ¹⁾, Universitas Negeri Yogyakarta ²⁾
purirenatama13@gmail.com ¹⁾, yoyonsuryono@yahoo.com ²⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, dan hasil program pelatihan wajib latih dan gladi lapang bagi masyarakat kawasan rawan bencana Merapi di desa Argomulyo Cangkringan Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan menggunakan model penelitian CIPP. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan perencanaan program pelatihan wajib dan gladi lapang merupakan hasil identifikasi BPBD Sleman dan kebutuhan masyarakat kawasan rawan bencana Merapi, pelaksanaan program pelatihan wajib latih dan gladi lapang ini berjalan dengan baik dan melibatkan narasumber yang memiliki kompetensi dibidangnya serta motivasi dan antusias peserta yang cukup tinggi, dan hasil pelaksanaan program pelatihan wajib latih dan gladi lapang ditunjukkan dengan perubahan sikap peserta yang meliputi kemampuan konseptual, teknis, dan sosial. Dampak dari program ini menunjukkan dampak positif yaitu peserta dapat melakukan tindakan pengurangan risiko secara mandiri dan berkelompok, memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki untuk menerapkan rencana kesiapsiagaan di lingkungan tempat tinggalnya.

Kata kunci: evaluasi program pelatihan, wajib latih, masyarakat kawasan rawan bencana Merapi

***AN EVALUATION OF THE OBLIGED TRAINING AND FIELD PRACTICE PROGRAM
FOR THE COMMUNITY AROUND DISASTER PRONE AREAS OF MERAPI***

Abstract

This study aims to investigate plan, implementation, and result of the obliged training and field practice program for the people in the village of Argomulyo Cangkringan Sleman. This was an evaluation study employing the CIPP. The data were collected through observations, interviews, and documentation. The results are as follows planning program obliged training and field practice program is the identification of BPBD Sleman and the needs of the community disaster prone area Merapi, the implementation of the programs obliged training and field practice program goes well involving the source of information that has competence as well as motivation and enthusiasm of the participants which is quite high, and the result of a training program obliged training and field practice program is indicated by a change in attitude of the participants that includes the conceptual, technical and and social ability. The training programs obliged training and field practice program have an impact that is positive participants can perform the act of risk reduction independently and in groups, utilizing the knowledge possessed to apply the plan of preparedness in the neighborhood of her residence.

Keywords: *evaluation of training program, obliged training, disaster prone areas of merapi volcano society*

PENDAHULUAN

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun faktor manusia. Kejadian bencana selalu memberikan dampak secara tiba-tiba sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda serta dampak psikologis.

Banyak pengertian atau definisi bencana yang pada umumnya merefleksikan karakteristik tentang gangguan terhadap pola hidup manusia, dampak bencana bagi manusia, dampak terhadap struktur sosial, kerusakan pada aspek sistem pemerintahan, bangunan, dan lain-lain serta kebutuhan masyarakat yang diakibatkan oleh bencana. Bencana menurut UN-ISDR (2004, p.3) adalah suatu kejadian, yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda dan kerusakan lingkungan, kejadian ini terjadi di luar kemampuan masyarakat dalam segala sumberdayanya.

Beberapa jenis bencana seperti gempa bumi, hampir tidak mungkin diperkirakan secara akurat kapan dan dimana akan terjadi serta besaran kekuatannya. Beberapa bencana lainnya seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, letusan gunung api, tsunami dan anomali cuaca masih dapat diramalkan sebelumnya. Sebagai fenomena alam, erupsi gunung api merupakan bahaya (*natural hazard*) yang tidak dapat dihindarkan keberadaannya maupun kejadiannya.

Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dari 129 gunung api yang ada di wilayah Indonesia, gunung Merapi (2986 mdpl) yang masuk dalam wilayah Kabupaten Sleman merupakan gunung api bahkan teraktif di dunia karena periodisitas letusannya relatif pendek yaitu 3-7 tahun. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2011, korban jiwa akibat erupsi gunung Merapi pada tahun 2010 sebanyak 347 orang. Korban terbanyak berada di Kabupaten Sleman yaitu 246 jiwa, menyusul Kabupaten

Magelang 52 jiwa, Klaten 29 jiwa, dan Boyolali 10 jiwa. Sedangkan pengungsi mencapai 410.388 orang serta ratusan keluarga terpaksa bertempat tinggal di hunian sementara (*shelter*) karena rumah mereka luluh lantak diterjang lahar gunung Merapi.

Secara total, kerugian dan kerusakan akibat bencana erupsi gunung Merapi pada akhir tahun 2010 mencapai 7,3 triliun rupiah (Republika, 2011). Sedangkan di Kabupaten Sleman total kerugian dan kerusakan mencapai 5,4 triliun rupiah yang terdiri dari kerugian sebesar 4,51 triliun dan kerusakan yang mencapai 894,35 miliar. Angka kerugian dan kerusakan tersebut meliputi sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor.

Erupsi Gunung Merapi tahun 2010 telah meninggalkan tumpukan material yang berada di kawasan Gunung Merapi yang jumlahnya sampai dengan saat ini sebesar 77 juta m³. Material erupsi tersebut jika dipicu curah hujan tinggi akan menjadi lahar hujan yang merupakan ancaman bagi warga di bantaran sungai Gendol dan sungai Opak, sungai Boyong, dan sungai Kuning. Menurut perhitungan BPPTKG tahun 2012, sebaran material yang berada di DAS (daerah aliran sungai) sungai Gendol diperkirakan masih sekitar 27 juta m³ dan di DAS sungai Opak sebesar 1,9 juta m³, jumlah tersebut terbanyak dibanding material yang ada di sungai Boyong (2,7 juta m³) dan sungai Kuning (3 juta m³). (Tempo.co.id, 2012).

Menurut UNISDR (2009, p.9) ancaman merupakan peristiwa, fenomena atau aktivitas manusia secara fisik yang memiliki potensi merusak yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa atau luka, kerusakan harta benda gangguan sosial dan ekonomi atau kerusakan lingkungan. Terkait konteks ancaman gunung Merapi, lahar adalah jenis ancaman sekunder. Ancaman primer berupa awan panas, lontaran batu pijar, lava pijar, dan hujan pasir/abu. Selain itu terdapat ancaman tersier yaitu ancaman gunung Merapi yang disebabkan oleh ulah manusia, seperti penambang pasir, perusakan lingkungan dan hutan di kawasan lereng Merapi.

Selama ini tindakan penanggulangan usaha penanggulangan bencana dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi resiko

belum optimal. Selain itu, penanganan bencana masih bersifat reaktif yang ditekankan hanya pada tanggap darurat bencana beserta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kenyataan ini, dikarenakan masyarakat daerah rawan bencana tidak mempunyai bekal pengetahuan terhadap penanganan bencana dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bencana itu sendiri. Pengetahuan, pemahaman, kapasitas dan ketrampilan untuk mengantisipasi ancaman berupa bencana alam tersebut sangat dibutuhkan untuk meminimalisir kerugian harta benda dan kehilangan nyawa. Hal tersebut menunjukkan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah seutuhnya tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Kerangka Aksi Hyogo (*Hyogo Framework for Action*) 2005-2015 juga menganjurkan seluruh negara di dunia agar menyusun mekanisme terpadu pengurangan risiko bencana yang didukung kelembagaan dan kapasitas sumber daya yang memadai. Lebih lanjut dalam *World Conference On Disaster Reduction 2005* di Kobe, Hyogo, Jepang, menyatakan pentingnya tiga tujuan strategik yaitu: (1) integrasi risiko bencana ke dalam perencanaan dan program pembangunan berkelanjutan, (2) pengembangan dan penguatan institusi, mekanisme dan kapasitas di semua tingkat secara sistematis pada peningkatan ketahanan terhadap bahaya, dan (3) inkorporasi sistematis terhadap pendekatan peredaman risiko bencana ke dalam kesiapsiagaan terhadap keadaan darurat, tanggap darurat serta pemulihan dalam rangka rekonstruksi pasca bencana.

Dampak erupsi gunung Merapi tahun 2010 menyebabkan perluasan kawasan rawan bencana menjadi 20 km dari puncak gunung Merapi. Kawasan rawan bencana sendiri terdiri dari III, yaitu kawasan rawan bencana I, II dan III. Kawasan rawan bencana I adalah kawasan yang berpotensi terlanda banjir lahar dan berpeluang terkena perluasan aliran awan panas dan lava. Bagi masyarakat yang tidak mau direlokasi, pilihannya adalah *living harmony with risk disaster*. Hal-hal yang dapat dilakukan agar dapat berdamai dengan bencana adalah dengan menyelaras-

kan pembangunan dan perencanaan mengikuti gejala alam.

Berdamai dengan bencana adalah solusi mengatasi segala bentuk kekhawatiran dan ketakutan, karena sesungguhnya perubahan alam itu pasti terjadi dan manusia harus mampu menyelaraskannya. Untuk itu, pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana seperti sistem peringatan dini, jalur evakuasi, rambu evakuasi, pendidikan kebencanaan tentang ancaman erupsi Merapi.

Kesadaran dan kesiapan masyarakat untuk melakukan tindakan penyelamatan serta meminimalisir kerugian harta benda akibat bencana perlu dipupuk sedini mungkin. Salah satu contoh aktivitas kesiapsiagaan bencana melalui pelatihan wajib latih dan gladi lapang. Pelatihan ini harus diikuti oleh semua warga masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Secara garis besar pelatihan wajib latih ini mengajarkan kepada para masyarakat bagaimana mengantisipasi dan menghadapi bahaya erupsi Merapi. Salah satu yang terpenting adalah ketika alarm/sistem peringatan dini berbunyi, masyarakat diharapkan untuk tidak panik dan segera keluar dari rumah dengan menggunakan jalur yang telah dibuat atau disepakati untuk menuju ke titik atau tempat evakuasi.

Wilayah Desa Argomulyo Cangkringan Sleman pada waktu bencana erupsi Gunung Merapi bulan November 2010 yang terkena aliran awan panas adalah di Padukuhan Bakalan, Gadingan, Suruh, Banaran, Jetis, Karanglo, Jaranan, Cangkringan, dan Brongkol. Terdapat 86 korban meninggal, 24 luka-luka, 58 ekor sapi mati, 189 ekor kambing mati, 7900 jiwa mengungsi. Sedangkan bahaya pasca erupsi adalah lahar dingin dan rusaknya kualitas sumber air. Untuk lahar dingin wilayah yang terkena dampak adalah di Padukuhan Bakalan, Gadingan, Suruh, Banaran, Jaranan, Cangkringan, Brongkol, Panggung, Kliwang, Teplok, Kebur Lor, Kebur Kidul, dan Sewon. Sekitar 30 Ha lahan pertanian rusak karena terkena dampak dari banjir lahar dingin.

Program penanggulangan bencana berupa wajib latih dan gladi lapang dapat dijadikan strategi dalam peningkatan kapasitas penanggulangan bencana masyarakat di

kawasan rawan bencana Merapi. Selain itu, juga dapat dijadikan alat rekayasa sosial bagi terbentuknya masyarakat berketahanan terhadap bencana (*community disaster resilience*) yang dicirikan adanya budaya siaga bencana atau selalu menggunakan pertimbangan-pertimbangan risiko masuk akal dalam keseharian aktifitas mereka.

Kesinambungan pelatihan wajib latih akan menjadikannya sebagai sumber pengetahuan dan nilai yang terus menerus digunakan sebagai prasyarat dasar perubahan sikap, cara berpikir, cara melihat, dan cara mendekati permasalahan bencana menjadi perilaku atau cara bekerja yang sesuai sikap. Agar perilaku ini dapat terpola berulang-ulang dan menjadi kebiasaan yang akhirnya akan menjadi suatu budaya.

Pengurangan risiko bencana adalah suatu pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangi kerentanan sosial ekonomi terhadap bencana dan juga menangani semua aspek lingkungan dan bahaya alam yang dapat menimbulkan. Tujuan pengurangan risiko bencana untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun yang lain yang menimbulkan kerentanan. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 2 Tahun 2012 tentang pedoman umum pengkajian risiko bencana pengkajian risiko bencana meliputi: (1) Kajian/identifikasi bahaya, (2) Kajian/identifikasi kerentanan, (3) Kajian/identifikasi kapasitas, (4) Kajian/identifikasi potensi risiko, (5) kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan hasil kajian dan peta risiko bencana.

Selain itu, pelibatan (partisipatif) semua pihak dalam pembuatan kajian risiko bencana dapat memunculkan rasa kesadaran bersama dalam penanggulangan bencana. Jika kajian risiko bencana telah disusun dengan baik dan disosialisasikan kepada masyarakat, kemungkinan bencana-bencana yang terjadi nantinya hanya akan menimbulkan korban yang relatif kecil.

Kesiapsiagaan berarti merencanakan tindakan untuk merespons jika terjadi bencana. Kesiapsiagaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan siap siaga dalam

menghadapi krisis, bencana atau keadaan darurat lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Mileti (1991, p.127) menyatakan bahwa kesiapsiagaan mencakup kegiatan seperti merumuskan, menguji dan melakukan latihan terhadap rencana bencana; memberikan pelatihan bagi responden bencana dan masyarakat umum, melakukan komunikasi dengan publik dan orang lain tentang kerentanan bencana, serta tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi hal tersebut.

Berdasarkan *framework* kesiapsiagaan terhadap bencana yang dibuat oleh LIPI-UNESCO/ISDR (2006, p.6), kesiapsiagaan dikelompokkan ke dalam empat parameter yaitu pengetahuan dan sikap/*knowledge and attitude* (KA), perencanaan kedaruratan/*emergency planning* (EP), sistem peringatan/*warning system* (WS) dan mobilisasi sumberdaya (RMC). Pengetahuan lebih banyak untuk mengukur pengetahuan dasar mengenai bencana alam seperti ciri-ciri, gejala dan penyebabnya. Perencanaan kedaruratan lebih ingin mengetahui mengenai tindakan apa yang telah dipersiapkan menghadapi bencana alam.

Perbedaan utama antara kesiapsiagaan dan mitigasi adalah mitigasi menganggap bencana dapat dicegah atau dampaknya dapat dikurangi. Namun kesiapsiagaan mengasumsikan bahwa bencana akan terjadi dan masyarakat harus siap menghadapinya. Dalam penyelenggaraan pengurangan risiko bencana bencana, kemampuan kesiapsiagaan yang kuat merupakan permasalahan awal. Kemampuan ini dapat dibangun dengan perencanaan, pelatihan, dan latihan.

Konsep kesiapsiagaan yang digunakan pada kajian kerangka penilaian kesiapsiagaan masyarakat di sini lebih ditekankan pada menyiapkan kemampuan untuk dapat melaksanakan kegiatan tanggap darurat secara cepat dan tepat. Kegiatan tanggap darurat meliputi langkah-langkah tindakan sesaat sebelum bencana, seperti peringatan dini (bila memungkinkan) meliputi penyampaian

peringatan dan tanggapan terhadap peringatan; tindakan saat kejadian bencana, seperti: melindungi/ menyelamatkan diri, melindungi nyawa dan beberapa jenis benda berharga, tindakan evakuasi; dan tindakan yang harus dilakukan segera setelah terjadi bencana, seperti: SAR, evakuasi, penyediaan tempat berlindung sementara, perawatan darurat, dapur umum, bantuan darurat.

Pendidikan dengan pelatihan merupakan suatu rangkaian yang tak dapat dipisahkan dalam sistem pengembangan sumberdaya manusia, yang di dalamnya terjadi proses perencanaan, penempatan, dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam proses pengembangannya diupayakan agar sumber daya manusia dapat diberdayakan secara maksimal, sehingga apa yang menjadi tujuan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia tersebut dapat terpenuhi.

Hasil penyelenggaraan program pelatihan adalah penguasaan kompetensi, keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang sebelumnya tidak dikuasai oleh peserta. Edwin B. Flippo (dalam Kamil 2010, p.3) mengemukakan bahwa: "*Training is the act of increasing the knowledge and skill of an employee for doing a particular job*" (pelatihan adalah tindakan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seorang pegawai untuk melaksanakan pekerjaan tertentu).

Adapun fungsi tujuan dalam pelatihan yang dikemukakan oleh Sudjana (2007, p.105) yaitu: (1) Sebagai tolak ukur penilaian dalam arti bahwa pelatihan dinilai berhasil apabila tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai sebagaimana diharapkan, (2) Sebagai pemberi arah bagi semua unsur/komponen pelatihan, khususnya pelatih dan peserta pelatihan, (3) Sebagai acuan tentang standar/kriteria untuk merancang kurikulum pelatihan seperti materi dan teknik serta media pelatihan dan alat evaluasi keluaran pelatihan, (4) Sebagai media komunikasi bagi pelatih.

Pemilihan suatu model pelatihan terutama didasarkan pada kebutuhan di satu pihak dan potensi atau peluang yang dimiliki dipihak lain. Kebutuhan menunjuk pada kebutuhan belajar peserta atau kebutuhan organisasi akan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan. Menurut Kamil

(2010, p.35) menjelaskan terkait model-model pelatihan dalam pendidikan luar sekolah diantaranya adalah: (1) model magang atau pemagangan, (2) model *internship*, (3) model pelatihan kerja, (4) model pelatihan keaksaraan, (5) model pelatihan kewirausahaan, (6) model pelatihan manajemen peningkatan mutu.

Macdonald (1972) dalam Bronto (2006, p.60) mendefinisikan gunung berapi adalah tempat atau bukaan dimana batuan kental pijar atau gas, umumnya keduanya, keluar dari dalam bumi ke permukaan, dan tumpukan bahan batuan di sekeliling lubang kemudian membentuk bukit atau gunung. Menurut Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral melalui VSI (*Vulcanological Survey of Indonesia*) gunung api adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas dan cairan lainnya ke permukaan bumi. Biasanya letusan gunung berapi juga disertai gempa bumi yang disebut gempa vulkanik.

Gunung api aktif berpotensi menimbulkan berbagai jenis fenomena yang disebut sebagai bahaya. Bencana terjadi jika terdapat persinggungan antara bahaya tersebut dengan kepentingan manusia dan kondisi lingkungan. Letusan gunung api selain menimbulkan kerugian dan korban juga dapat mengubah tanah, air dan lingkungan pada umumnya secara drastis bahkan pada jarak yang jauh dari pusat erupsi.

Menurut Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung (2009, p.83) bahaya yang ditimbulkan oleh aktivitas erupsi gunung api diantaranya yaitu: (1) aliran lava, (2) aliran piroklastik, (3) tephra, (4) lahar, (5) longsor, (6) gas vulkanik, (7) gempa bumi, (8) tsunami. Bahaya gunung api dapat dikelompokkan menjadi bahaya primer atau langsung dan bahaya sekunder atau tak langsung bagi kehidupan manusia. Bahaya primer terjadi hanya selama letusan gunung api sedang berlangsung, sedangkan bahaya sekunder tidak terbatas hanya pada saat berlangsungnya aktivitas erupsi.

Peningkatan kapasitas masyarakat yang bermukim di kawasan rawan bencana Merapi bertujuan untuk mengembangkan suatu "kultur keselamatan" dimana seluruh anggota masyarakat sadar akan bahaya-

bahaya yang dihadapi, mengetahui bagaimana melindungi diri mereka, dan akan mendukung upaya-upaya perlindungan terhadap orang lain dan masyarakat secara keseluruhan. Hal terpenting dalam rangka peningkatan kapasitas ini adalah memandang masyarakat sebahai subyek dan bukan sebagai objek penanganan bencana dalam proses pembangunan.

Dengan demikian, dipandang penting untuk melakukan upaya penanggulangan bencana erupsi gunung Merapi dalam hal pelatihan wajib latih dan gladi lapang guna terlaksananya pembinaan yang optimal terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Merapi. Hal ini dapat dilakukan terlebih dahulu melakukan suatu pengkajian yang mendalam dalam menyelenggarakan pelatihan wajib latih dan gladi lapang yang dilakukan sekarang ini. Melalui pengkajian evaluasi diharapkan diperoleh pemahaman mengenai tingkat kemajuan dalam penyelenggaraan pelatihan wajib latih dan gladi lapang dan memungkinkan dihasilkannya rencana-rencana tindakan yang dapat dilakukan guna pengembangan pelatihan wajib latih dan gladi lapang di BPBD Sleman.

Evaluasi menurut Stufflebeam dan Shinkfield (1985, p.159) merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggung jawaban dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Sedangkan menurut Arikunto dan Jabar (2008, p.3), evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan cermat dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponennya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini diambil karena dalam penelitian ini sasaran objek penelitian dibatasi agar data-data yang diambil dapat digali sebanyak mungkin serta dimungkinkan tidak ada pelebaran objek penelitian. Penelitian yang dilakukan ini

dikategorikan penelitian evaluasi menggunakan model CIPP (*Context, Input, Proseses, Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam.

Penelitian ini dilakukan di BPBD Sleman dan Desa Argomulyo Cangkringan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2015 sampai dengan Maret 2015. Subjek penelitian ini sebanyak 5 orang terdiri dari 1 penyelenggara, 1 narasumber, dan 3 peserta yang mengikuti kegiatan wajib latih dan gladi lapang.

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, perpanjangan pengamatan dan meminta pendapat ahli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil wawancara terkait perencanaan pelatihan wajib latih dan gladi lapang terlebih dahulu dilakukan identifikasi kebutuhan, sasaran, dan analisis. Identifikasi kebutuhan berdasarkan pada desa yang memiliki paling tinggi risiko bencana sebagai dasar menentukan lokasi pelatihan dan potensi bencana apa saja yang ada di lingkungannya.

Kegiatan wajib latih dan gladi lapang yang diselenggarakan oleh BPBD Sleman merupakan suatu bentuk proses pelatihan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, terutama bagi mereka yang tinggal di kawasan rawan bencana Merapi. Tujuan umum pelaksanaan pelatihan wajib latih dan gladi lapang yaitu peserta mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang potensi ancaman bencana yang ada dilingkungannya dan meningkatkan kapasitas/ketrampilan masyarakat untuk melindungi diri sendiri, keluarga, maupun anggota masyarakat lainnya saat terjadi bencana.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatihan wajib latih dan gladi di desa Argomulyo Cangkringan yaitu identifikasi kebutuhan pelatih-

an terkait ancaman bencana erupsi Merapi dan banjir lahar hujan. Sasaran peserta diantaranya perangkat desa, tokoh masyarakat. Rencana jangka pendek, menengah dan panjang dari pelatihan wajib latih dan gladi lapang yaitu melatih masyarakat tentang karakteristik ancaman, kerentanan dan resiko bencana agar masyarakat menjadi siap dalam menghadapi bencana saat erupsi Merapi terjadi. Dengan adanya program dari BPBD Sleman maka sangat membantu sekali bagi perangkat desa untuk mengadakan pelatihan penanggulangan bencana erupsi Merapi.

Kegiatan pelatihan wajib latih dan gladi lapang yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman memiliki alasan tersendiri. Kegiatan wajib latih dan gladi lapang diadakan karena melihat kondisi daerah Sleman terdapat gunung api aktif yaitu gunung Merapi yang siklus letusan rata-rata 4 tahun dan masyarakat yang. Selain itu, sebagai bekal pengetahuan masyarakat tentang potensi bencana yang ada dilingkungannya.

Dari hasil wawancara dengan narasumber dan peserta dapat diperoleh data bahwa kegiatan wajib latih dan gladi lapang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menambah pengetahuan dan bekal mereka saat terjadi erupsi Merapi. Hal tersebut dapat dilihat dari respon positif dan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan.

Peserta yang mengikuti kegiatan wajib latih dan gladi lapang tidak memiliki dasar terkait pengurangan risiko bencana. Mereka memiliki pengalaman tentang kejadian saat erupsi Merapi terjadi.

Terkait kondisi lingkungan desa Argomulyo mendukung untuk pelaksanaan kegiatan wajib latih dan gladi lapang. Hal ini dikarenakan desa Argomulyo berada di kawasan rawan bencana Merapi dan dialiri 2 sungai yang berhulu di Merapi. Sehingga ancaman utamanya adalah awan panas dan banjir lahar hujan.

Motivasi peserta dalam mengikuti kegiatan sangat tinggi. Hal ini terlihat dari kesiapan peserta mengikuti kegiatan dari awal sampai waktu kegiatan selesai. Selain itu masyarakat masih trauma pasca kejadian erupsi Merapi 2010 yang begitu cepat.

Peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan wajib latih sebanyak 30 orang sedangkan gladi lapang sejumlah 250 orang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, komunitas peduli bencana. Sedangkan narasumber/instruktur pelatihan wajib latih dan gladi lapang diambil dari akademisi dan praktisi. Akademisi berasal dari UGM, sedangkan praktisi diambil dari BPPTKG Yogyakarta, BMKG Yogyakarta, BPBD Sleman, dan PMI Sleman.

Penyelenggaraan pelatihan wajib latih dan gladi lapang dibiayai dari APBD Sleman melalui DPA BPBD Kabupaten Sleman tahun 2014 sebesar Rp, 35.480.000,-. Fasilitas terkait peserta wajib latih diantaranya bantuan transport, konsumsi (makan, minum dan snack), kaos, dan alat tulis. Sedangkan fasilitas peserta gladi berupa bantuan transport dan konsumsi.

Waktu penyelenggaraan kegiatan wajib latih dan gladi lapang dilaksanakan 1 tahun 1 kali dan pada tahun 2014 dari tanggal 13-16 Oktober 2014. untuk pelatihan wajib latih bertempat di Aula Balai Desa Argomulyo Cangkringan Sleman. Sedangkan untuk gladi lapang banjir lahar hujan sungai Gendol-Opak bertempat di lapangan Jetis Argomulyo Cangkringan.

Aktifitas peserta dalam mengikuti kegiatan pelatihan dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari aktifitas mereka dalam menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan bekerja secara individu maupun tim dengan koordinasi yang terarah. Sikap rasa ingin tahu yang tinggi dan berani memberikan argumentasi/pendapat kepada narasumber.

Metode pelatihan ini dilaksanakan dengan mengkombinasikan metode indoor dan *outdoor activity*, dengan dikemas berdasarkan prinsip andragogi, *discovery approach*, *experiential learning*, *role play* dan study lapang. Materi kegiatan wajib latih dan gladi lapang diantaranya tinjauan klimatologis banjir lahar hujan, kebijakan pemerintah Sleman dalam penanganan bencana, ancaman pasca erupsi Merapi dan karakteristik morfologi sungai, penanganan darurat bencana (mekanisme bantuan saat terjadi bencana), pemaparan rencana kontijensi banjir lahar hujan, manajemen pertolongan perta-

ma gawat darurat (PPGD) dan praktek lapang serta terakhir ditutup dengan gladi lapang. Selain itu, hubungan yang terjalin antara peserta dengan para narasumber di BPBD Sleman terjalin dengan baik. Hal ini terlihat dari sikap ramah dan selalu memotivasi kepada peserta.

Hasil dan manfaat yang terjadi pada kelompok sasaran atau peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan yaitu peserta mampu mengenali ancaman pasca erupsi Merapi dan karakteristik morfologi sungai, penanggulangan darurat bencana (mekanisme bantuan saat bencana), manajemen pertolongan pertama gawat darurat (PPGD), serta gladi lapang berupa simulasi banjir lahar. Dalam aspek produk dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di Desa Argomulyo Cangkringan dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan dikarenakan setiap komponen saling mendukung untuk proses kegiatan.

Hasil pelatihan wajib latih dan gladi lapang yaitu terjadi perubahan perilaku masyarakat selama mengikuti kegiatan dimana peserta sudah mampu mempersiapkan dirinya sendiri untuk menghadapi ancaman bencana yang berpotensi di tempat tinggalnya. Kemudian pelatihan wajib latih dan gladi lapang dalam mengembangkan individu baik dalam aspek pengetahuan dan keterampilan saat terjadi bencana erupsi Merapi dan lahar hujan. Manfaat yang diperoleh masyarakat desa Argomulyo setelah mengikuti pelatihan wajib latih dan gladi lapang meliputi kemampuan teknis, sosial, dan konseptual.

Kendala-kendala dalam pelaksanaan pelatihan wajib latih dan gladi lapang yaitu dana yang terbatas, peserta datang terlambat, dan masyarakat belum sepenuhnya memahami gambaran skenario bencana. Selain itu, peralatan terkait penanggulangan bencana yang dimiliki oleh Desa Argomulyo masih minim.

Pembahasan

Perencanaan pada hakikatnya adalah alat yang digunakan untuk memastikan masa depan yang lebih baik. Dalam konteks risiko bencana, masa depan yang lebih baik dicirikan dengan kesiapan untuk menghadapi bencana, kemampuan untuk meminim-

malisir dampak bencana, dan kemampuan pulih dengan baik, baik itu bagi entitas sosial atau pun sebuah sistem. Pada tahap pra-bencana dalam situasi terdapat potensi bencana dilakukan penyusunan rencana kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi bencana tertentu (*single hazard*) maka disusun satu rencana yang disebut rencana kontinjensi (*contingency plan*). Perencanaan program penanggulangan melalui pelatihan bencana wajib latih dan gladi lapang yang diselenggarakan oleh BPBD Sleman dikatakan efektif karena memenuhi kriteria sebagai berikut; (a) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, (b) animo peserta dan masyarakat dalam mengikuti program cukup tinggi, (c) adanya jaringan instansi pemerintah lain yang terlibat dengan pelaksanaan program.

Kegiatan wajib latih dan gladi lapang yang diselenggarakan oleh BPBD Sleman merupakan suatu bentuk proses pelatihan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, terutama bagi mereka yang tinggal di kawasan rawan bencana Merapi dan dapat dijadikan alat rekayasa sosial bagi terbentuknya masyarakat berketahanan terhadap bencana (*community disaster-resillience*) yang dicirikan adanya budaya siaga bencana atau selalu menggunakan pertimbangan-pertimbangan resiko masuk akal dalam aktivitas keseharian masyarakat.

Desa Argomulyo merupakan wilayah pedesaan yang dialiri 2 sungai yang berhulu di Merapi yaitu sungai Gendol dan Opak. Pasca letusan gunung Merapi tahun 2010, material yang berada di alur sungai Gendol dan sungai Opak semakin banyak. Kejadian banjir lahar yang dipicu oleh hujan tinggi dan kemiringan lereng yang membawa material hasil erupsi dapat terjadi di musim hujan. Dampak aliran lahar Merapi tidak hanya membawa kerugian pada lingkungan yang dilaluinya, tetapi juga pada kerugian harta benda dan menelan korban jiwa. Aliran lahar Merapi yang melebihi daya tampung sungai akan membanjiri dan merusak bangunan pemukiman, sarana umum, dan infrastruktur lainnya. Banjir lahar juga menelan korban jiwa penduduk yang bertempat

tinggal dan berkegiatan di sekitar daerah bahaya aliran lahar.

Pelatihan wajib latih dan gladi lapang bagi masyarakat kawasan rawan bencana khususnya desa Argomulyo Cangkringan yang diselenggarakan pihak BPBD Sleman telah mampu memberikan akses pendidikan bagi masyarakat karena dalam menentukan program yang akan dilaksanakan merupakan hasil identifikasi BPBD Sleman dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pelatihan ini diarahkan pada pengetahuan masyarakat tentang potensi bencana yang ada di lingkungannya, meningkatkan kesadaran akan resiko, meningkatkan kapasitas/keterampilan masyarakat untuk melindungi diri sendiri, keluarga, maupun anggota masyarakat lainnya saat terjadi bencana.

Dalam penyelenggaraan pengurangan risiko bencana bencana, kemampuan kesiapsiagaan yang kuat merupakan permasalahan awal. Kemampuan ini dapat dibangun dengan perencanaan, pelatihan, dan latihan. Sedangkan prinsip dasar kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana dititikberatkan pada tahap kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi. Kesiapsiagaan sendiri merupakan kegiatan maupun upaya yang dilakukan untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara efektif, termasuk didalamnya penerbitan *warning* yang tepat waktu dan tepat sasaran serta evakuasi bagi manusia dan harta benda dari tempat yang terancam bencana.

Pada penyelenggaraan wajib latih dan gladi lapang berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa proses penyelenggaraan dapat dikatakan berjalan dengan baik. Selain itu hasil observasi menunjukkan bahwa keadaan lingkungan dan fasilitas sarana-prasarana dapat dikatakan baik karena dapat mendukung dan mencukupi kebutuhan masyarakat seperti penentuan kesepakatan titik kumpul yang telah ditetapkan bersama-sama, adanya rambu-rambu jalur evakuasi pengungsian.

Terkait aspek konteks, kebutuhan dan partisipasi peserta sangat antusias untuk mengikuti kegiatan pelatihan. pengalaman peserta pasca erupsi Merapi 2010 kemarin masih teringat jelas dalam ingatan para peserta dengan cepatnya meluluh lantakkan

pemukiman mereka terutama yang tinggal dekat aliran sungai Gendol dan Opak. Kondisi lingkungan disana juga sangat mendukung untuk kegiatan pelatihan wajib latih dan gladi lapang karena Desa Argomulyo berada di kawasan rawan bencana Merapi dan dilalui 2 aliran sungai yang berhulu di Merapi yaitu sungai Gendol dan sungai Opak.

Pada aspek masukan yang meliputi motivasi warga menunjukkan tinggi, karakteristik tingkat pendidikan peserta yang berbeda-beda tetapi tidak menjadi hambatan dalam proses pembelajaran, karakteristik narasumber dalam bidang pelatihan yang memiliki banyak pengalaman terdiri dari dari akademisi dan praktisi, kurikulum yang diterapkan dapat dikatakan menggunakan pengalaman, pemaparan topik dan diskusi, pendanaan serta sarana prasarana juga mendukung proses kegiatan pelatihan.

Dalam proses pembelajaran peserta memiliki kesungguhan dalam mengikuti kegiatan wajib latih dan gladi lapang seperti penanganan darurat bencana (mekanisme bantuan saat bencana), pemaparan kontijensi banjir lahar hujan dan manajemen PPGD serta praktek lapang/simulasi. Media dan metode yang diterapkan dalam proses pembelajaran yaitu menggunakan berbagai peralatan yang digunakan sebagai penunjang kegiatan. Sedangkan untuk metode pelatihan ini dilaksanakan dengan mengkombinasikan metode *indoor* dan *outdoor activity*, dengan dikemas berdasarkan prinsip pendekatan orang dewasa (*andragogi*). Selain itu, hubungan antara peserta dan narasumber terjalin dengan baik seperti hubungan dalam keluarga.

Pelaksanaan pelatihan wajib latih dan gladi lapang terdapat beberapa fase yang telah dilakukan pada tahap kesiapsiagaan diantaranya membentuk manajemen darurat, menilai bencana, membuat rencana darurat, mengembangkan sistem peringatan dini, mengidentifikasi sumber daya dan bantuan, serta membuat kesepakatan untuk saling membantu dan mendidik masyarakat. Konsep kesiapsiagaan yang digunakan pada kajian kerangka penilaian kesiapsiagaan masyarakat di sini lebih ditekankan pada menyiapkan kemampuan untuk dapat melaksanakan

kegiatan tanggap darurat secara cepat dan tepat.

Pelatihan yang telah diselenggarakan oleh BPBD Sleman kepada masyarakat Desa Argomulyo khususnya yang mengikuti wajib latih dan gladi lapang sebagai strategi peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di kawasan rawan bencana Merapi dan juga dijadikan alat rekayasa sosial bagi terbentuknya masyarakat berketahanan terhadap bencana (*community disaster resilience*) yang dicirikan adanya budaya siaga bencana atau selalu menggunakan pertimbangan-pertimbangan resiko masuk akal dalam keseharian aktifitas mereka.

Peningkatan kapasitas masyarakat yang bermukim di kawasan rawan bencana Merapi bertujuan untuk mengembangkan suatu "kultur keselamatan" dimana seluruh anggota masyarakat sadar akan bahaya-bahaya yang dihadapi, mengetahui bagaimana melindungi diri mereka, dan akan mendukung upaya-upaya perlindungan terhadap orang lain dan masyarakat secara keseluruhan. Hal terpenting dalam rangka peningkatan kapasitas ini adalah memandang masyarakat sebagai subyek dan bukan sebagai objek penanganan bencana dalam proses pembangunan, untuk itu perlu dikembangkan upaya seperti pendidikan bencana, sosialisasi pengetahuan, dan pelatihan simulasi.

Kesinambungan pelatihan penanggulangan bencana (wajib latih) akan menjadikannya sebagai sumber pengetahuan dan nilai yang terus menerus digunakan sebagai prasyarat dasar perubahan sikap (cara pikir, cara melihat, dan cara mendekati permasalahan bencana) menjadi perilaku (cara bekerja) yang sesuai sikap. Agar perilaku ini dapat terpola berulang-ulang dan menjadi kebiasaan yang akhirnya akan menjadi suatu budaya.

Manfaat dari pelaksanaan program pelatihan wajib latih dan gladi lapang lebih dirasakan pada kemampuan teknis, konseptual dan sosial. Secara teknis, bisa dikatakan peserta mampu menggunakan pengetahuan, metode, teknik, dan peralatan. Sementara secara konseptual memahami kompleksitas organisasi dan penyesuaian bidang gerak unit kerja masing-masing ke dalam bidang

operasi secara menyeluruh. Sedangkan secara sosial kemampuan dalam bekerjasama dengan melalui orang lain dan memiliki sikap tanggung jawab serta kepemimpinan.

Keberhasilan dari kegiatan tersebut dapat terlihat dengan adanya peningkatan kapasitas peserta bidang kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman primer, sekunder, maupun tersier gunung Merapi. Peserta memiliki pengetahuan dasar dan keterampilan menyelamatkan diri dan aset-asetnya dari ancaman primer maupun sekunder gunung Merapi sehingga mampu menerapkan rencana kesiapsiagaan yang telah disusun/disepakati bersama.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelatihan wajib latih dan gladi lapang yaitu terbatasnya dana, masih minim peserta perempuan, peserta ada yang datang terlambat dan terbatasnya peralatan yang dimiliki desa Argomulyo Cangkringan seperti perlengkapan dapur umum, tenda pengungsian. Namun dengan berbagai cara yang kreatif maka kendala tersebut dapat teratasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Perencanaan pelatihan wajib latih dan gladi lapang yang diselenggarakan oleh BPBD Sleman melibatkan semua masyarakat desa Argomulyo Cangkringan Sleman yaitu perangkat desa, tokoh masyarakat, karang taruna, PKK, dan komunitas peduli bencana agar supaya dari pihak warga desa mengetahui dan memberikan masukan terkait dengan pelatihan yang akan dijalankan bersama-sama. Pelaksanaan program penanggulangan bencana wajib latih dan gladi lapang ini yang meliputi aspek konteks, masukan, proses, dan hasil dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan program. Hasil dari program wajib latih dan gladi lapang ini bagi peserta yang terlibat yaitu mampu memahami konsep pengurangan risiko bencana dan melakukan kajian risiko bencana serta menerapkan rencana kesiapsiagaan di lingkungan tempat tinggalnya. Memiliki pengetahuan dasar dan keterampilan menyelamatkan diri serta aset-asetnya dari ancaman primer maupun sekunder

erupsi gunung Merapi sehingga dapat menerapkan rencana kesiapsiagaan yang telah disusun. Masyarakat dapat secara aktif melakukan upaya penyelamatan, bukan pasif menunggu bantuan atau pertolongan datang. Manfaat lebih dirasakan pada sisi kemampuan teknis, konseptual, dan sosial peserta.

Saran

Dalam pengembangan yang dilakukan oleh unsur penyelenggara program pasca pelatihan yaitu memberikan pendampingan yang berkelanjutan kepada warga masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Selain itu peran aktif masyarakat sekitar perlu ditingkatkan terkait kegiatan program penanggulangan bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi & Abdul Jabar, Cepi Safrudin. (2008). *Evaluasi program pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Bronto, Sutikno. (2006). Fasies gunung api dan aplikasinya. *Jurnal Geologi Indonesia, Vol.1 No. 2 Juni 2006: 59-71*. Bandung.
- Kamil, Mustofa. (2010). *Model pendidikan dan pelatihan (konsep dan aplikasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung. (2009). *Mengelola risiko bencana di Negara Maritim Indonesia: bencana kebakaran, kelautan dan atmosfer*. Bandung.
- Mileti, D.M. (1991). *Disaster by design: a reassessment of natural hazards in the United States*. Washington, D.C: Joseph Henry Press.
- Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. (2014). Gunung Merapi. Diakses dari <http://pvmbg.bgl.esdm.go.id> pada tanggal 22 September 2014.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Ringkasan Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005-2015. (18-22 Januari 2005). *Membangun ketahanan bangsa dan komunitas terhadap bencana. Makalah disajikan dalam Seminar Internasional (World Conference on Disaster Reduction): Hyogo, Kobe, Jepang*.
- Sopaheluwakan, Jan dkk. (2006). *Kajian kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi bencana gempa bumi dan tsunami*. LIPI-UNESCO/ISDR.
- Stufflebeam, D.L. & Shinkfield, A.J. (1985). *Systematic evaluation. needham heights*: Simon & Schuster Custom Publishing.
- UNISDR. (2004). *Living with risk: A global review of disaster reduction initiatives, inter-agency secretariat of the international strategy for disaster reduction (UNISDR)*.
- United Nations Internasional. (2009.) *UNISDR terminology on disaster risk reduction. published by the United Nations International. Geneva, Switzerland, May 2009*.